

Analisis Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Rokan Hulu

Arifal Hidayat^{1,*}, Khairul Fahmi¹, Rismalinda¹, Dessy Triana²

¹Program Studi Teknik Sipil
Universitas Pasir Pengaraian
Jl. Tuanku Tambusai, Rambah,
Kec. Rambah Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu, Riau 28558
arifal.upp@upp.ac.id
khairulfahmi@upp.ac.id
rismalinda@upp.ac.id

²Program Studi Teknik Sipil
Universitas Serang Raya
Jl. Raya Cilegon Drangong
Serang - Banten No.Km. 5,
Taman, Drangong, Kec.
Taktakan, Kota Serang,
Banten 42162
trianadessy08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa menurut persepsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner sebanyak 21 responden dari pihak dinas DPMPD Kabupaten Rokan Hulu. Data kuesioner di uji dengan rumus indeks kepentingan dan uji data statistik dengan rumus korelasi produk moment dan rumus *Crosbach Alpha*. Kesimpulan akhir dari penelitian yaitu bahwa peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu menurut persepsi dinas DPMPD memiliki nilai kinerja yang BAIK. Peran PDTI yang harus ditingkat kedepannya adalah sebagai berikut : (1) Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya; (2) Koordinasi menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat; (3) Membantu penanganan masalah yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur desa; (4) Membimbing pembuatan RAB infrastruktur desa.

Kata kunci: peran PDTI; DPMPD; produk moment dan *Crosbach Alpha*.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the Village Facilitator Infrastructure Technician (PDTI) in carrying out his duties as a village facilitator according to the perception of the Rokan Hulu Regency Community Empowerment and Village Government Office (DPMPD). The research method was carried out by means of interviews and questionnaires as many as 21 respondents from the DPMPD office of Rokan Hulu Regency. The questionnaire data was tested with the importance index formula and statistical data test with the product moment correlation formula and the *Crosbach Alpha* formula. The final conclusion of the research is that the role of PDTI in sustainable infrastructure development in Rokan Hulu Regency according to the perception of the DPMPD office has a GOOD performance value. The role of PDTI that should be improved in the future is as follows: (1) Reporting all problems that arise and efforts to handle them; (2) Coordinating good relations with the bureaucracy and community leaders; (3) Assisting in handling problems related to village infrastructure activities; (4) Guiding the preparation of village infrastructure RABs.

Key words: role of PDTI; DPMPD; product moment and *Crosbach Alpha*.

1. PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat, pendamping desa memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan desa berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendamping desa adalah tenaga profesional yang ditunjuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (PDT)

untuk membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa [3]. Pendamping Desa bertugas untuk mengarahkan dan memfasilitasi desa dengan memberdayakan masyarakat desa. Keberhasilan implementasi dana desa ditentukan oleh pendampingan. Adanya pendampingan akan memperkuat proses pembangunan desa karena akan mendampingi penggunaan dana desa secara efektif dan terarah, baik dalam bentuk pembangunan yang memberdayakan masyarakat maupun untuk pembangunan infrastruktur. Program tersebut bertujuan menciptakan pembangunan desa yang partisipatif dalam menata keuangan desa dalam perencanaan pembangunan serta pemberdayaan desa [9].

Beberapa permasalahan terhadap peran pendamping desa di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain:

1. Kurang maksimalnya kinerja pendampingan PDTI dalam pembangunan desa berkelanjutan.
2. Peran PDTI yang lemah dalam membimbing pembuatan desain konstruksi infrastruktur desa
3. Peran PDTI yang lemah dalam melakukan pelatihan & bimbingan teknis kepada PLD & Kader desa
4. PDTI terindikasi melanggar kode etik sebagai pendamping desa.
5. Perlunya evaluasi peran PDTI.

Triyanto D (2018), kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa belum maksimal, dapat dilihat dari kerjasama yang dibangun oleh pendamping desa Taba Jambu belum optimal, kerjasama yang baru dilakukan yaitu baru sebatas kerjasama dengan masyarakat desa dan pemerintah desa, belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan ekonomi desa, karena terkendala mengenai rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, managerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu [15].

Lestari dkk (2021), bahwa kinerja tenaga pendamping desa belum maksimal sehingga pembangunan desa belum optimal dan ada yang tidak terealisasi keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga pendamping desa, yaitu komunikasi, Sumber daya manusia rendah, pelatihan bagi pendamping dan akses desa yang sulit dijangkau. Strategi yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT setelah itu dievaluasi menggunakan perangkat Tes Litmus yaitu Perbaikan peraturan dan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa, biaya operasional pendamping desa, pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih terarah dan kontinyu [4].

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 543 tahun 2023 tentang Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2024 menetapkan jumlah pendamping desa untuk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 30 orang dengan komposisi PDP berjumlah 18 orang, sedangkan PDTI berjumlah 12 orang yang bertugas di wilayah kecamatan di Rokan Hulu [3].

Sejauh ini peran Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa belum teridentifikasi dengan sistematis, sehingga perlu dilakukan penelitian analisis peran pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Rokan Hulu.

1.1 Pendamping Desa (PD)

Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mendampingi, memfasilitasi, dan mendukung masyarakat desa dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Pendamping terdiri dari pendamping dari unsur pemerintah, pendamping profesional, dan pendamping organik (skala lokal desa). Seluruh pendamping bertugas untuk melaksanakan pendampingan desa sebagai operasionalisasi atas kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 [9].

Pendamping desa (PD) yang bertugas di kecamatan secara umum akan bertugas untuk mendampingi pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan tugasnya di kecamatan, pendamping desa bekerjasama dengan camat dan aparat pemerintah di kecamatan umumnya serta pelaku-pelaku pendampingan [5]. Pendamping desa (PD) dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)

Pendamping Desa Pemberdayaan mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes.

2. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur pada program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mempunyai Tugas Pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader desa teknis, fasilitas pembangunan yang bersekala lokal desa.

3. Pendamping Lokal Desa (PLD)

Dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di desa. Pembinaan dan pengelolaan PLD akan dilaksanakan oleh Satker P3MD Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi.

1.2 Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader desa teknis, fasilitasi pembangunan yang bersekala lokal desa diantaranya [6]:

A. Tugas Pokok

- 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.
- 2) Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB.
- 3) Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
- 4) Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan Desa.

- 5) Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa/ antardesa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

B. Output Kerja

- 1) Kader teknik dan tim pelaksana kegiatan desa mampu menjalankan tupoksinya dengan baik
- 2) Tim pelaksana kegiatan dan kader teknik desa maupun membuat desain dan RAB
- 3) Proses fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa berjalan dengan baik
- 4) Adanya jaminan kualitas terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana desa
- 5) Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

C. Indikator

- 1) Tersediannya data kader-kader teknik desa yang telah terlatih
- 2) Terlaksananya pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa
- 3) Tersedianya desain dan RAB untuk setiap kegiatan pembangunan
- 4) Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan
- 5) Tersedianya papan informasi kegiatan
- 6) Semua infrastruktur hasil kegiatan pembangunan di desa di sertifikasi
- 7) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sarana prasarana desa/antar desa
- 8) Tersedianya informasi pembangunan sarana prasarana desa/antar desa.

1.3 Penilaian Kinerja Pendampingan Desa

Dalam Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, diatur mekanisme penilaian terhadap kinerja pendamping desa yang dilakukan setiap tahun dibulan Desember. Pendamping Desa bertugas di kecamatan sesuai dengan surat penugasannya, dan yang ditugaskan memberikan penilaian evaluasi kinerjanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/ToR Pendamping Desa (PD) adalah : pihak kecamatan; pihak tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten; pihak inspektorat kabupaten [7].

Berikut ini adalah format evaluasi penilaian kinerja Pendamping Desa yang terbagi dalam 4 aspek penilaian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1 Angket penilaian kinerja Pendamping Desa (PD)

A. Kinerja Pendampingan	
1	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa
2	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa
3	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana produksi pendukung ekonomi desa
4	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa
5	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana elektrifikasi desa
6	Mendampingi survey rencana kegiatan infrastruktur yang akan didanai Dana Desa
7	Membimbing pembuatan desain konstruksi infrastruktur desa
8	Membimbing pembuatan RAB infrastruktur desa

9	Mendampingi proses pelelangan dalam rangka kegiatan infrastruktur desa
10	Membimbing pembuatan gambar puna laksana infrastruktur desa
B. Kinerja Supervisi	
1	Melakukan kunjungan efektif ke desa-desa di wilayah tugasnya
2	Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap dan jelas
3	Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan tenaga teknis yang ada di desa
4	Menyusun rencana pembelajaran untuk kegiatan trial lapangan
5	Melakukan trial lapangan sebelum kegiatan infrastruktur dimulai
6	Melakukan pelatihan & bimbingan teknis kepada PDL & Kader desa
7	Memberi OJT dan IST kepada PLD, Kader desa dan lembaga terkait
8	Memeriksa dan memvalidasi pembukuan kegiatan infrastruktur desa
9	Melakukan supervisi dalam hal pemeliharaan hasil kegiatan infrastruktur desa
10	Membantu penanganan masalah yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur desa
C. Kinerja Koordinasi	
1	Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas
2	Koordinasi menjalin hubungan baik dengan supervisor
3	Koordinasi menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat
4	Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif
5	Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping
D. Kinerja Administrasi	
1	Membuat laporan akurat dan tepat waktu
2	Laporan up date sesuai kondisi lapangan
3	Mengirim semua data yang diminta supervisor
4	Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya
5	Aktif menulis pengalaman lapangan / Good Prantices

1.4 Indeks Kepentingan

Teknik analisis ini berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatannya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu. Rumus indeks kepentingan [2]". Rumus indeks kepentingan (*mean rank*) adalah :

$$\text{Mean} = I = \sum_{i=1}^4 \frac{a_i X_i}{N}$$

I = indeks kepentingan

N = jumlah responden

X_i = frekuensi jawaban dari setiap persepsi (1,2,3,4)

a_i = nilai atas persepsi/opini yang diberikan (1,2,3,4).

1.5 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambang r [10]. Dasar pengambilan keputusan penelitian untuk memeriksa keakuratan item kuesioner adalah:

a. Jika r hitung > r tabel, dinyatakan valid.

b. Jika r hitung < r tabel, dinyatakan tidak valid.

Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, berikut untuk menentukan nilai t hitung :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \times \sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2) \times (N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

- N = jumlah kuesioner
- X = skor pertanyaan (1,2,3,4)
- Y = skor total
- XY = skor pertanyaan dikalikan skor total
- r = korelasi produk momen.

Sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha* yaitu:

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

keterangan:

- r_i = Koefisien reliabilitas *Cronbach Alfa*
- k = jumlah item
- $\sum S_i^2$ = jumlah varians skor tiap item
- S_t^2 = Varians total.

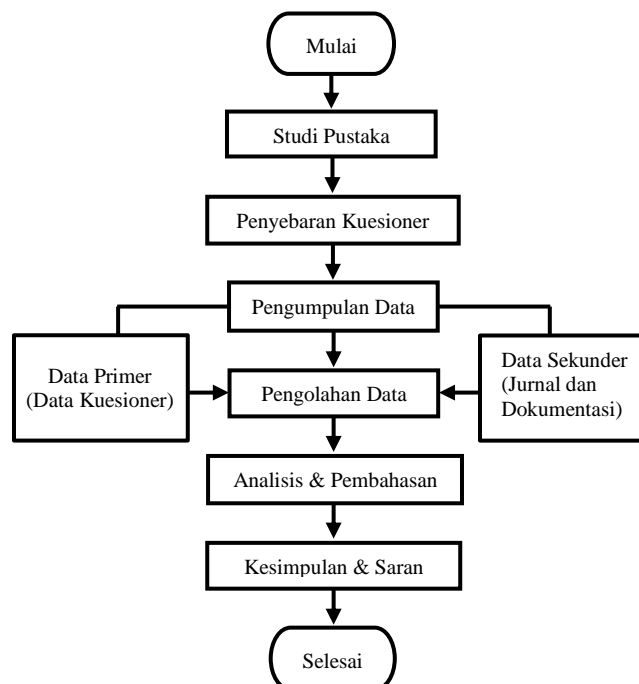
Tabel 2. Nilai koefisien *Cronbach Alpha*

Nilai r	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

2. MATERIAL DAN METODE

2.1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar tahapan penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan penelitian

2.2 Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di Kabupaten Rokan Hulu.

2.3 Sampel Penelitian

Berikut ini adalah jumlah sampel penelitian yang menjadi responden dalam penelitian ini:

Tabel 3. Jumlah sampel penelitian dari dinas DPMPD

No	Responden	Jumlah responden
1	Kepala Dinas DPMPD	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Bidang Pemerintahan Desa & staff	2
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat & staff	2
5	Bidang Pembangunan Infrastruktur & staff	3
6	Kasi Pemerintahan Desa & staff	2
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & staff	2
8	Kasi Pembangunan Infrastruktur & staff	2
9	Staf Administrasi	2
10	Staf Pendamping Ekonomi Masyarakat	2
11	Staf Pembangunan	2
Jumlah responden		21

2.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Pengambilan data dilakukan dengan cara :

- 1) Menggunakan kuesioner dan wawancara kepada pihak dinas DPMPD. Daftar pertanyaan telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2) Pertanyaan pada proses wawancara disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil wawancara dijadikan pembanding dari hasil data yang didapatkan melalui kuesioner.
- 3) Studi kepustakaan
Mengumpulkan data dan informasi sebagai landasan teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara mengkaji literatur berupa jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.5 Rancangan Kuesioner

Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin. Kuesioner dirancang dalam dua kelompok yaitu :

1. Data responden, terdiri dari jabatan, pendidikan dan pengalaman responden di dinas DPMPD.
2. Persepsi responden pada peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

2.6 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data kuesioner terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus *mean rank* (indeks kepentingan), yang merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata digunakan untuk menentukan peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kabupaten Rokan Hulu.

Nilai *mean* ini didapat dengan cara menjumlahkan data seluruh responden dalam kelompok yang telah mengisi kuesioner, kemudian dibagi dengan jumlah responden yang ada pada kelompok tersebut. Skala pengukuran yang dipakai memakai skala Likert. Untuk analisis data perhitungan dibantu dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows* versi 23 [14].

Selanjutnya data kuesioner dilakukan tahapan uji validitas dan reliabilitas menggunakan rumus korelasi *product moment* dan rumus *Cronbach Alfa* dengan taraf signifikan 5% melalui beberapa tahap proses uji terhadap sampel penelitian. Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dianalisis merupakan hasil penelitian dari 21 responden yang merupakan sampel penelitian, yang disebarkan menggunakan kuesioner kepada pihak dinas DPMPD kabupaten Rokan Hulu dalam menganalisis peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

3.1 Analisis Terhadap Profil Responden

Berikut hasil keseluruhan persentase pada kategori profil responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Profil responden

Kategori	Persentase (%)
Jabatan responden	
a) Kadis DPMPD	5
b) Sekretaris DPMPD	5
c) Bidang PD	10
d) Bidang PM	10
e) Bidang PI	15
f) Kasi PD	10
g) Kasi PM	10
h) Kasi PI	10
i) Staff adm	10
j) Staff PEM	10
k) Staff pembangunan	10
Pendidikan responden	
a) SMA/ sederajat	14
b) D.3	10
c) S.1	62
d) S.2	14
Pengalaman responden	
a) 1 – 5 tahun	19
b) 5 – 10 tahun	48
c) > 10 tahun	33

3.2 Analisis Peran PDTI Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Rokan Hulu

Hasil rangkuman hasil kuesioner terhadap peran kinerja PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Jawaban responden terhadap peran kinerja PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator Peran	Jawaban Responden				
		SB	B	C	KB	Jlh
1 Kinerja Pendampingan						
a	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa	0	7	13	1	21
b	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa	0	4	16	1	21
c	Fasilitasi pembangunan sarana & prasarana produksi pendukung ekonomi desa	0	6	14	1	21
d	Fasilitasi pembangunan & pengelolaan sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa	0	5	16	0	21
e	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana elektrifikasi desa	0	3	17	1	21
f	Mendampingi survey rencana kegiatan infrastruktur yang akan didanai Dana Desa	0	2	17	2	21
g	Membimbing pembuatan desain konstruksi infrastruktur desa	0	0	20	1	21
h	Membimbing pembuatan RAB infrastruktur desa	0	0	19	2	21
i	Mendampingi proses pelelangan dalam rangka kegiatan infrastruktur desa	0	7	14	0	21
j	Membimbing pembuatan gambar purna laksana infrastruktur desa	0	6	15	0	21
2 Kinerja Supervisi						
a	Melakukan kunjungan efektif ke desa-desa di wilayah tugasnya	1	9	9	2	21
b	Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap dan jelas	1	9	10	1	21
c	Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan tenaga teknis yang ada di desa	0	4	16	1	21
d	Menyusun rencana pembelajaran untuk kegiatan trial lapangan	1	3	17	0	21
e	Melakukan trial lapangan sebelum kegiatan infrastruktur dimulai	0	1	20	0	21
f	Melakukan pelatihan & bimbingan teknis kepada PDL & Kader desa	1	4	16	0	21
g	Membimbing pembuatan desain konstruksi infrastruktur desa	0	6	15	0	21
h	Membimbing pembuatan RAB infrastruktur desa	0	4	16	1	21
i	Mendampingi proses pelelangan dalam rangka kegiatan infrastruktur desa	2	2	15	2	21
j	Membantu penanganan masalah yg berhubungan dengan kegiatan infrastruktur desa	0	0	18	3	21
3 Kinerja Koordinasi						
a	Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas	1	3	17	0	21
b	Koordinasi menjalin hubungan baik dengan supervisor	0	3	15	3	21
c	Koordinasi menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat	0	2	15	4	21
d	Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif	1	2	16	2	21
e	Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping	1	1	16	3	21

4 Kinerja Administrasi						
a	Membuat laporan akurat dan tepat waktu	0	8	11	2	21
b	Laporan up date sesuai kondisi lapangan	0	5	14	2	21
c	Mengirim semua data yang diminta supervisor	1	3	15	2	21
d	Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya	0	0	17	4	21
e	Aktif menulis pengalaman lapangan / Good Prantices	2	4	14	1	21

3.3 Analisis Indeks Kepentingan

Hasil indeks kepentingan terhadap peran kinerja PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Hasil analisis indeks kepentingan

Peran PDTI Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hulu		<i>Mean</i>	<i>Ranking</i>
1. Kinerja Pendampingan			
a.	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa	2,714	8
b.	Fasilitasi pembangunan sarana & prasarana transportasi desa	2,857	5
c.	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana produksi pendukung ekonomi desa	2,761	7
d.	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa	2,762	6
e.	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana elektrifikasi desa	2,905	4
f.	Mendampingi survey rencana kegiatan infrastruktur yang akan didanai Dana Desa	3,000	3
g.	Membimbing pembuatan desain konstruksi infrastruktur desa	3,047	2
h.	Membimbing pembuatan RAB infrastruktur desa	3,095	1
i.	Mendampingi proses pelelangan dalam rangka kegiatan infrastruktur desa	2,667	10
j.	Membimbing pembuatan gambar purna laksana infrastruktur desa	2,714	9
2. Kinerja Supervisi			
a.	Melakukan kunjungan efektif ke desa-desa di wilayah tugasnya	2,571	9
b.	Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap dan jelas	2,524	10
c.	Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan tenaga teknis yang ada di desa	2,857	3
d.	Menyusun rencana pembelajaran untuk kegiatan trial lapangan	2,761	6
e.	Melakukan trial lapangan sebelum kegiatan infrastruktur dimulai	2,952	2
f.	Melakukan pelatihan & bimbingan teknis kepada PDL & Kader desa	2,666	8
g.	Memberi OJT dan IST kepada PLD, kader desa & 263ating263 terkait	2,714	7
h.	Memeriksa & memvalidasi pembukuan kegiatan infrastruktur desa	2,857	5
i.	Melakukan supervisi dalam hal pemeliharaan hasil kegiatan	2,809	4

infrastruktur desa		
j. Membantu penanganan masalah yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur desa	3,143	1
3. Kinerja Koordinasi		
a. Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas	2,762	5
b. Koordinasi menjalin hubungan baik dengan supervisor	3,000	2
c. Koordinasi menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat	3,095	1
d. Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif	2,857	4
e. Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping	3,000	3
4. Kinerja Adminstrasi		
a. Membuat laporan akurat dan tepat waktu	2,714	4
b. Laporan up date sesuai kondisi lapangan	2,857	2
c. Mengirim semua data yang diminta supervisor	2,857	3
d. Melaporkan semua masalah yang timbul & upaya penanganannya	3,190	1
e. Aktif menulis pengalaman lapangan / good prantices	2,667	5

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kabupaten Rokan Hulu yang harus ditingkatkan menurut persepsi dinas DPMPD adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan bimbingan pembuatan RAB infrastruktur desa (nilai indeks = 3,190); 2. Membantu penanganan masalah yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur desa (nilai indeks = 3,143); 3. Melakukan koordinasi menjalin hubungan yang baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat (nilai indeks = 3,095); 4. Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya = 3,190).

3.4 Analisis Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat [12]. Hasil Uji Validitas data responden dengan taraf signifikan sebesar 5 % disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Hasil uji validitas

Variabel	r – Hitung	r - Tabel	Kesimpulan
1. Kinerja Pendampingan			
1h	0,7048	0,432	Valid
2. Kinerja Supervisi			
2j	0,7156	0,432	Valid
3. Kinerja Koordinasi			
3c	0,7014	0,432	Valid
4. Kinerja Administrasi			
4d	0,7436	0,432	Valid

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan pada 21 responden, dimana nilai r_{tabel} (korelasi *product moment*) dengan taraf signifikan 5% yaitu sebesar 0,432. Hasil uji validitas instrumen didapat seluruh pertanyaan mempunyai nilai r hitung lebih besar dari angka kritik tabel ($r_{tabel} = 0,432$) artinya seluruh pertanyaan memiliki validitas yang baik dan layak digunakan untuk menjawab hasil penelitian.

3.5 Analisis Reliabilitas

Reliabilitas merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu digunakan oleh kelompok orang atau orang yang sama dalam waktu berlainan atau kalau instrumen digunakan oleh orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau waktu yang berlainan. Jika hasilnya konsisten, maka instrumen dapat dipercaya (*reliable*) atau dapat di andalkan (*dependen*) [13].

Uji reliabilitas dilakukan pada 21 responden yang sama dengan responden uji validitas kepada responden dari dinas DPMPD kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil analisis uji reliabilitas instrumen penelitian diperoleh nilai *Alpha Cronbach* = 0,8991, dimana pengukuran terhadap peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kabupaten Rokan Hulu memiliki nilai interpretasi yang tinggi. Artinya variabel instrumen penelitian dapat dikatakan *reliable*. Nilai interpretasi ini menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan memiliki tingkat konsistensi yang baik.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan akhir dari penelitian yaitu bahwa peran PDTI dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu menurut persepsi dinas DPMPD memiliki nilai kinerja yang BAIK. Peran PDTI yang harus ditingkat kedepannya adalah sebagai berikut : (1) Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya; (2) Koordinasi menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh masyarakat; (3) Membantu penanganan masalah yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur desa; (4) Membimbing pembuatan RAB infrastruktur desa.

UCAPAN ERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan artikel jurnal ini:

1. Rektor UPP, LPPM-UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, dan atas arahan, bimbingan serta dukungan selama proses penelitian internal;
2. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu mengisi kuesioner;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ascarya Academia, (2023). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kuantitatif, Contoh Kasus Dan Ulasan*. <https://ascarya.or.id/validitas-dan-reliabilitas-penelitian-kuantitatif/#respond>
- [2] Drs.Taufiqurrahman M.Si, (2022). *Cara Hitung Kuisisioner Pada Skala Likert*. <https://saintekmu.ac.id/myblog/taufiqurrachman/read/cara-hitung-kuisisioner-pada-skala-likert>
- [3] Keputusan Menteri. (2022). *Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022*.
- [4] Lestari YT, Hamdi M, Megandaru WK. (2021). *Kinerja Tenaga Penadamping Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal JISIPOL, Vol. 5 No. 2. April (24-43)

- <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/384>.
- [5] <https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desaAnomin>. diakses pada tanggal 6 April 2025, pada jam, 20:17 WIB.
- [6] <https://tamansaridesa.blogspot.com/2019/06/tugas-pokok-pendamping-desa-teknik.html?m=1> diakses pada tanggal 6 April 2025, pada ja, 20:35 WIB.
- [7] <https://www.beritabandabaro.com/2016/10/tupoksi-pd-ti.html?m=1> diakses pada tanggal 6 April 2025, pada jam, 21:20 WIB.
- [8] https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf diakses pada tanggal 5 April 2025, pada jam, 21:33 WIB.
- [9] Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa*.
- [10] Sahid Raharjo. (2019). *Cara Membaca Distribusi Nilai r Tabel Product Moment Lengkap* <https://www.spssindonesia.com/2019/01/cara-membaca-nilai-r-tabel-product-moment.html#more>.
- [11] Sekaran U. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*.
- [12] Sugiyono, (2012). *Opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif*.
- [13] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2013.
- [14] Usman., *Pengantar Statistik*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2018.
- [15] Triyanto, D. (2018). *Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)*. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56–62.
https://www.researchgate.net/publication/335561804_Analisis_Kinerja_Pendamping_Desa_Dalam_Upaya_Membangun_Kemandirian_Desa